

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Amira Lintang Azzahra

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: amiralintang18@gmail.com

| Histori Artikel                                                                                                                                                                                                                  | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diterima:</b><br>6 Juli 2026                                                                                                                                                                                                  | <b>Purpose:</b> This study aims to prove the influence of Regional Original Income, Balancing Funds, Capital Expenditure on Regional Government Financial Performance with Population as a Moderating Variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Revisi:</b><br>6 Juli 2026                                                                                                                                                                                                    | <b>Method:</b> This quantitative research uses panel data analysis covering 35 Central Java Provinces, the data used comes from the APBD Realization Report and BPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disetujui:</b><br>9 Juli 2026                                                                                                                                                                                                 | <b>Finding:</b> The results show that PAD positively influences local government financial performance, but Capital Expenditure and Balancing Funds have no significant impact. Population can control the relationship between independent variables and financial performance.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diterbitkan:</b><br>1 September 2026                                                                                                                                                                                          | <b>Novelty:</b> This study adds the Population variable as a moderating variable in the relationship between Regional Original Revenue (PAD), Balanced Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Governments in Central Java Province for the 2019–2023 period. The use of this moderating variable is still rarely done in previous studies, so it is hoped that it will provide a more comprehensive understanding of the factors that influence regional financial performance. |
| <b>Keywords:</b><br>Local Own-Source Revenue;<br>Balancing Funds;<br>Capital Expenditure;<br>Population;<br>Regional Financial Performance;                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi<br><br>Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan ekonomi dimulai dari meletakkan pondasi yang kuat di atas kebijakan ekonomi yang baik. Kebijakan ekonomi yang baik pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi inefisiensi dalam sistem dan dengan demikian memperbaiki keadaan masyarakat secara keseluruhan Andjarwati et al., (2021) . Amandemen itu dimaksudkan guna mendukung terwujudnya hasil guna serta daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif dan memiliki manfaat yang optimal dalam menyejahterakan masyarakat serta memperkuat koordinasi dalam berbagai elemen dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, yang mana sebuah wujud pengukurannya adalah kinerja keuangan daerah Arsallya & Yusnaini, (2021)

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah penurunan realisasi belanja modal pemerintah. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, pada semester I tahun 2019, realisasi belanja modal pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses administrasi yang kompleks dan keterlambatan pencairan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan serta berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah Rika, (2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang dihasilkan oleh sebagian daerah dan dipungut berdasarkan kebijakan yang diatur dalam regulasi daerah yang selaras aturan hukum yang berlaku Digdowiseiso et al., (2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah, menunjukkan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kemandirian fiskal Nafiah & Wardhani, (2023).

Pertumbuhan serta pembangunan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kapasitas suatu wilayah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, makin kecil ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pengukuran Kinerja Keuangan melibatkan tiga rasio utama, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi Ayu, (2018). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan Belanja Modal secara signifikan, maka dapat dikatakan cukup maju dan sejahtera secara ekonomi, begitu pula sebaliknya Rustiyani & Barus, (2023).

Investasi dalam Belanja Modal juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi swasta Lathifa & Haryanto, (2019). Beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan Ardelia et al., (2022) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Thalib & Ekaningtias., (2019) dalam studi bahwa Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang kurang menguntungkan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dimana semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, maka makin rendah nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mencerminkan tingkatan efisiensi kinerja keuangan yang semakin baik. Besarnya penghasilan yang diperoleh manajemen pemerintah daerah punya pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. ketidaksamaan lain, dari penelitian Azhar, (2021) dan Rustiyani & Barus, (2023) yang mengutarakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki dampak terhadap Kinerja Keuangan.

Kinerja Keuangan yang baik di tingkat daerah dapat mempengaruhi porsi belanja modal untuk sumber daya publik Riswan and Affandi, (2014). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bisa dipengaruhi Belanja Modal, menurut Digdowiseiso et al., (2022) dan Lathifa & Haryanto, (2019) maka Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Thalib & Ekaningtias, (2019) menyatakan bilamana besar kecilnya Belanja Modal tidak berpengaruh atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan yakni dana yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke daerah yang hendak digunakan guna membiayai tindakan daerah itu supaya tercapai sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mutu pelayanan Andaresta et al., (2021). Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus ialah bagian integral lewat APBD, baik di jenjang Provinsi, Kota, ataupun Kabupaten, yang berasal dari Dana Perimbangan Machmud & Radjak, (2018). Kinerja fiskal daerah menunjukkan perbaikan dengan peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta beberapa provinsi mencapai surplus anggaran. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Dana Perimbangan juga mempengaruhi hasil finansial pemerintah daerah. Ardelia et al., (2022) dan Thalib & Ekaningtias, (2019) menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, dimana kenaikan Dana Perimbangan yang diberi oleh pemerintah pusat, sehingga kian rendah nilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang menyatakan level Kinerja Keuangan yang semakin baik. Penelitian lain dari Nauw & Riharjo, (2021) dan Yuliawati et al., (2024) menyatakan jika Dana Perimbangan tidak memberikan dampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini terbukti melalui asumsi bahwasannya pengelolaan Dana Perimbangan oleh pemerintah daerah belum menjadi faktor penentu dalam Kinerja Keuangan mereka.

Jumlah Penduduk ialah salah satu faktor penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produksi. Pertumbuhan penduduk yang cepat bukan menjadi penghambat bagi

pembangunan ekonomi karena penduduk juga memiliki peran terhadap ekonomi yaitu dari segi permintaan maupun penawaran. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diteliti oleh Ariyani et al., (2018) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah & Sulkadria, (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun Jumlah Penduduk telah banyak diteliti dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian yang menguji peran Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih relatif terbatas.

Studi mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah topik yang menarik untuk dieksplorasi, dikarenakan aspek keuangan sering kali dianggap sensitif dan memerlukan analisis mendalam. Studi yang telah dilaksanakan dalam mengukur variabel Kinerja Keuangan memakai tiga rasio, yaitu “rasio kemandirian, ketergantungan, serta desentralisasi” Ardelia et al., (2022). Penelitian Hadinata et al., (2024) menggunakan menggunakan rasio efisiensi untuk menghitung Kinerja Keuangan. Sedangkan, penelitian lain dari Zein et al., (2024) Kinerja Keuangan diuji melalui rasio kemandirian, efektivitas, desentralisasi fiskal, dan ketergantungan. Sedangkan, dalam variabel itu peneliti menghitung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan rasio efisiensi.

Meskipun penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi sehingga belum diperoleh kesimpulan empiris yang konklusif. Beberapa penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif maupun tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Selain itu, penelitian terdahulu seperti Ardelia et al., (2022), Digdowiseiso et al., (2022) dan Rustiyani & Barus, (2023) umumnya hanya menguji pengaruh langsung variabel fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji peran Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih relatif terbatas sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada pengaruh langsung variabel fiskal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian ini menguji peran Jumlah Penduduk sebagai faktor demografis yang dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Jumlah Penduduk tidak hanya mencerminkan besarnya kebutuhan pelayanan publik, tetapi juga merepresentasikan potensi penerimaan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan langsung antara variabel fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi juga mengungkap peran kondisi demografis dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan keuangan daerah melalui integrasi aspek fiskal dan demografis dalam menjelaskan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris baru mengenai peran Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023.

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS****Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (Agency Theory) dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam hubungan tersebut sering terjadi asimetri informasi, yaitu kondisi ketika *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal*, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan perilaku oportunistik Periansya et al., (2021).

Menurut Putri & Amanah, (2020) perbedaan informasi antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik, seperti inefisiensi, penyalahgunaan anggaran, maupun tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntabilitas dan pengawasan yang memadai agar *agent* dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan *principal*.

Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan Kinerja Keuangan sebagai bentuk pemenuhan amanah yang diberikan masyarakat Ardelia et al., (2022).

Teori keagenan relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pemerintah pusat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dana Perimbangan menunjukkan hubungan keagenan antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* dalam pengelolaan dana transfer untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sementara itu, Belanja Modal merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi mencerminkan besarnya masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah daerah, sehingga dapat memengaruhi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan Digdowiseiso et al., (2022). Dalam perspektif Agency Theory, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri sehingga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Aji, (2020) dan Irene & Siregar, (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Abdul Halim, (2014) bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan akan dimasukkan ke dalam akun penghasilan pemerintah daerah, maka meningkatkan jumlah pendapatan pemerintah daerah. Dalam ini, pemerintah daerah masih bergantung dalam pemerintah pusat. Bertambah tinggi dana perimbangan, maka bertambah rendah kinerja Thalib & Ekaningtias, (2019). Ini berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya semakin kuat dan semakin bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi apabila Dana Perimbangan rendah maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya juga semakin rendah.

Berdasarkan Agency Theory, pemerintah pusat berperan sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* yang menerima mandat untuk mengelola dana transfer secara efektif. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat mengurangi motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Agency Theory, tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan berpotensi menurunkan kemandirian fiskal sehingga Kinerja Keuangan daerah cenderung menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia et al., (2022) dan Aryllan & Achmad, (2024) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Pengaruh Belanja Modal Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membeli atau membangun aset Rarun et al., (2019) Pengeluaran ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan manfaat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks teori keagenan, Belanja Modal dan pengelolaan aset digunakan untuk menyediakan sarana prasarana unggulan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola asset-asset ini dengan hati-hati dikarenakan dana yang digunakan berasal pada manajemen. Pemerintah yang diberi wewenang dalam Belanja Modal perlu memiliki tanggung jawab atas penjagaan aset tetap Ardelia et al., (2022).

Dalam Agency Theory, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dipercayakan masyarakat sebagai *principal*. Belanja Modal merupakan salah satu bentuk penggunaan anggaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah. Pengelolaan Belanja Modal yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Dengan demikian, Belanja Modal yang dikelola secara efektif diharapkan mampu meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Natalia & Suprpto., (2023) dan Leki et al., (2018) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian, yang berupa penarikan pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk maka akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Murib et al., (2018). Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya Jumlah Penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan Jumlah Penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah Sukirno, (2003).

Dalam perspektif Agency Theory, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif. Jumlah Penduduk yang besar mencerminkan semakin banyaknya *principal* yang harus dilayani sehingga tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin tinggi. Selain itu, Jumlah Penduduk yang besar berpotensi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk diduga mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin optimal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk diperkirakan memperkuat hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Oktiani et al., (2021); Saldi et al., (2021) dan Octafiani et al., (2025) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H4 : Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah , dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, Dana Perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian Dana Perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Salah satu fungsi pemerintah daerah dalam rangka Fatimah et al., (2020). Jumlah Penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah Dengan demikian Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Fadli et al., (2021).

Dana Perimbangan dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena tingginya ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran. Ketergantungan ini sering kali menyebabkan alokasi anggaran yang kurang optimal, di mana dana digunakan untuk belanja rutin daripada investasi produktif yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Perimbangan dapat memicu pemborosan anggaran dan inefisiensi Fadilah & Andriani, (2025).

Berdasarkan Agency Theory, pemerintah pusat berperan sebagai *principal* yang menyalurkan Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada daerah dengan Jumlah Penduduk yang besar, kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas umum menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan Dana Perimbangan menjadi semakin penting

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk diduga memperkuat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pada daerah dengan Jumlah Penduduk yang besar, ketergantungan terhadap Dana Perimbangan menjadi semakin tinggi sehingga hubungan negatif antara Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah cenderung semakin kuat. Dengan demikian, Jumlah Penduduk diperkirakan memperkuat hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Yuliana & Asmara, (2024) dan Cherilina & Mooy, (2019) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Dana Perimbangan.

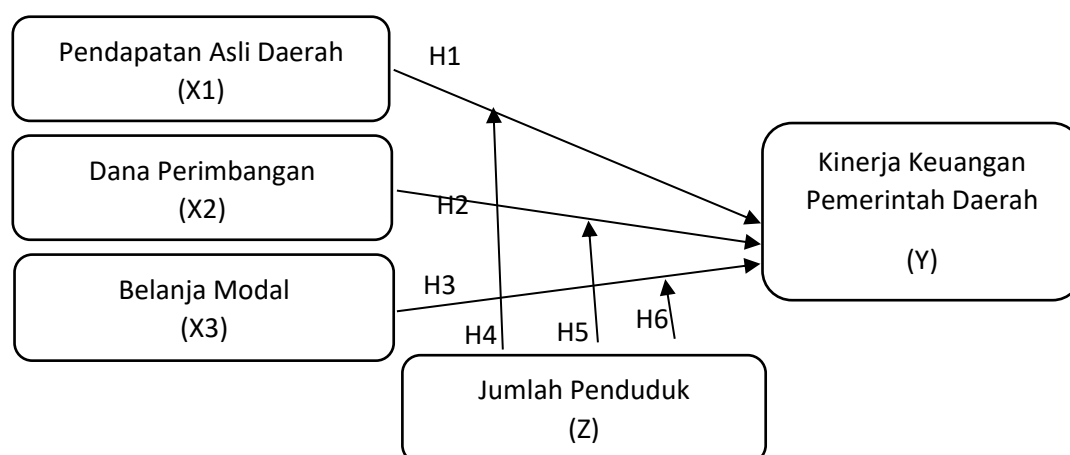
H5: Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Dana Perimbangan, dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.

### Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya Setiawati et al., (2021). Salah satu potensi ekonomi adalah Jumlah Penduduk Syahrani et al., (2024). Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang Jumlah Penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan Jumlah Penduduk yang besar akan membutuhkan Belanja Modal yang besar pula Putra et al., (2023).

Dalam Agency Theory, pemerintah daerah sebagai agent memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran publik guna memenuhi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Belanja Modal merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dan sarana publik. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan terhadap pembangunan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk diduga mampu memperkuat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena manfaat pembangunan yang dihasilkan akan dirasakan oleh lebih banyak masyarakat sehingga mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Jumlah Penduduk diperkirakan memperkuat hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Cherilina & Mooy, (2019) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dahliah, (2022) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat dikatakan Jumlah Penduduk bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Belanja Daerah.

H6 : Jumlah Penduduk dapat memperkuat hubungan antara Belanja Modal, dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah



**Gambar 1. Model Peneliti**

Sumber: Peneliti, (2025)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi (BPS), (DJPK), (BPK), serta dokumen (APBD). Data yang dikumpulkan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Data penelitian merupakan data panel yang terdiri atas data cross section sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data time series selama periode 2019–2023 sehingga diperoleh 175 unit observasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 menggunakan pendekatan pooled data, yaitu menggabungkan seluruh observasi menjadi satu set data untuk dianalisis dengan regresi linier berganda dan uji moderasi. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh antarvariabel penelitian tanpa membedakan efek spesifik masing-masing kabupaten/kota maupun periode pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
Hasil Uji Analisis Deskriptif

|                    | N   | Minimum   | Maximum   | Mean       | Std. Deviation |
|--------------------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| Kinerja            | 175 | 14        | 146       | 29.87      | 19.783         |
| PAD                | 175 | 212780000 | 3.E+9     | 454846743  | 354710354      |
| Perimbangan        | 175 | 55165000  | 241363000 | 159818611  | 45182583.0     |
| Belanja            | 175 | 75190000  | 1.E+9     | 311041886  | 160774884      |
| Moderasi JP        | 175 | 121526    | 2043077   | 1022396.55 | 465609.436     |
| Valid N (listwise) |     |           |           |            |                |

Sumber: Hasil penelitian, diolah 2025

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah paling rendah selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebesar 14% yaitu Blora pada tahun 2019 dan yang tertinggi sebesar 146 % yaitu Kota Semarang pada tahun 2023. Rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 19,78 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling rendah selama kurun waktu tahun 2019-2020 sebesar Rp 212.780.000 yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2019 dan yang tertinggi sebesar Rp. 3.835.100.000 yaitu Kota Semarang pada tahun 2023. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp Rp 354.710.354.

Dana Perimbangan paling rendah selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebesar Rp. 55.165.000 yaitu Kota Magelang pada tahun 2022 dan yang tertinggi sebesar Rp. 2.413.630.000 yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2023. Rata-rata Dana Perimbangan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 451.825.830. Belanja Modal paling rendah selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebesar Rp. 75.190.000 yaitu Kota Salatiga pada tahun 2022 dan yang tertinggi sebesar Rp. 1.089.360.000 yaitu Kota Semarang pada tahun 2023 Rata-rata Belanja Modal kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 160.774.884

Jumlah Penduduk paling rendah selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebesar 121.526 jiwa yaitu Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dan yang tertinggi sebesar 2.043.077 jiwa yaitu Kabupaten Brebes pada tahun 2023. Rata-rata Jumlah Penduduk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 465609.436 jiwa.

Uji Hipotesis

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F juga dapat

dilihat dengan nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih kecil dari toleransi 0,05 maka hipotesis H1 diterima yaitu seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

|   | Model     | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F     | Sig.              |
|---|-----------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressin | 92.555         | 4   | 23.139      | 5.167 | .001 <sup>b</sup> |
|   | Residual  | 761.310        | 170 | 4.478       |       |                   |
|   | Total     | 853.865        | 174 |             |       |                   |

Sumber: Hasil penelitian, diolah 2025

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah (Y).

**Tabel 3**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

|   | Model          | Unstandardized<br>B | Coefficients<br>Std. Error | Standardized<br>Coefficients<br>Beta | T       | Sig. |
|---|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|------|
| 1 | (Constant)     | 4011.893            | 95.957                     |                                      | 41.809  | .000 |
|   | PAD            | 5.469               | .112                       | .980                                 | 48.925  | .000 |
|   | D. Perimbangan | -22.122             | .668                       | -.505                                | -33.098 | .000 |
|   | Belanja        | 2.649               | .273                       | .066                                 | .275    | .002 |

Sumber: Hasil penelitian, diolah 2025

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf nyata 5%. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan signifikansi 0.000 (<0.05) dan koefisien regresi bertanda positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Variabel dana perimbangan dengan signifikansi 0.000 (<0.05) dan koefisien regresi bertanda negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Variabel Belanja Modal dengan signifikansi 0.002 (<0.05) dan koefisien regresi bertanda positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar 4.011,893. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dianggap konstan, maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 4.011,893. Variabel Pendapatan Asli Daerah PAD memiliki koefisien regresi sebesar 5,469 yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 5,469%, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar -22,122 yang berarti setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 22,122%, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 2,649 yang berarti setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1% akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 2,649%, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### **Uji Selisih Nilai Mutlak (Absolut Residual)**

Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi berganda dengan uji selisih nilai mutlak (absolut residual) dengan variabel moderating yaitu Jumlah Penduduk.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Selisih Nilai Mutlak (Absolut Residual)**

| Model          | Unstandardized<br>B | Coefficients<br>Std. Error | Standardized<br>Coefficients<br>Beta | T       | Sig. |
|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|------|
| 1 (Constant)   | 32.370              | 1.554                      |                                      | 20.833  | .000 |
| PAD            | 5.148E-8            | .000                       | .923                                 | 37.879  | .000 |
| D. Perimbangan | -1.739E-6           | .000                       | -.397                                | -16.086 | .000 |
| Belanja        | -3.481E-10          | .000                       | -.003                                | -.134   | .894 |
| X1M            | 3.106               | .799                       | .163                                 | 3.889   | .000 |
| X2M            | -.424               | .669                       | -.017                                | -.633   | .527 |
| X3M            | -.338               | .622                       | -.015                                | -.543   | .588 |

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Hasil penelitian, diolah 2025

Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Jumlah Penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, H4 diterima.

Dana Perimbangan (X2) dengan Jumlah Penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,527 ( $>0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, H5 ditolak.

Belanja Modal (X3) dengan Jumlah Penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,588 ( $>0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh Belanja Modal (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, H6 ditolak.

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji t dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula Kinerja Keuangan Daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari wilayahnya sendiri, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi berkurang.

Temuan ini sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agent memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai principal untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif dan akuntabel. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sehingga tingkat kemandirian fiskal meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Dalam perspektif Agency Theory, masyarakat sebagai principal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri sehingga

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Argumen ini didukung oleh penelitian Prastiwi & Aji, (2020) dan Irene & Siregar, (2020) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji t dengan nilai sig.  $0,527 > 0,05$ . Artinya, besar atau kecilnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini sesuai dengan Agency Theory yang memandang pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Dana Perimbangan diberikan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara empiris, semakin besar proporsi Dana Perimbangan yang diterima daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah cenderung kurang optimal dalam menggali sumber pendapatan daerah sehingga Kinerja Keuangan menjadi kurang mandiri. Oleh karena itu, peningkatan Dana Perimbangan tidak selalu mencerminkan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardelia et al., (2022) dan Aryllan & Achmad, (2024) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya transfer pusat belum tentu diikuti dengan peningkatan efisiensi dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji t dengan nilai sig.  $0,588 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa peningkatan atau penurunan Belanja Modal tidak terbukti mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah secara signifikan. Temuan ini mendukung Agency Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agent berkewajiban mengelola anggaran publik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sebagai principal. Belanja Modal yang dialokasikan secara tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Secara empiris, peningkatan Belanja Modal dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan investasi, serta memperluas basis penerimaan daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktiani et al, (2021) dan Saldi et al., (2021) yang menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk mampu memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji selisih nilai mutlak dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$  Dalam perspektif Agency Theory, semakin besar Jumlah Penduduk sebagai principal, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pada saat yang sama, Jumlah

Penduduk yang besar juga meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja keuangan pada daerah dengan Jumlah Penduduk yang tinggi. Dengan kata lain, Jumlah Penduduk memperkuat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin banyak aktivitas ekonomi yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Temuan ini mendukung penelitian Oktiani et al., (2021); Saldi et al., (2021) dan Octafiani et al., (2025) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk mampu memperkuat hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

#### **Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji selisih nilai mutlak dengan nilai sig.  $0,527 < 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya Jumlah Penduduk tidak mengubah pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme alokasi Dana Perimbangan telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui formula tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya Jumlah Penduduk. Oleh karena itu, efektivitas Dana Perimbangan lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan pemerintah daerah dibandingkan oleh besarnya Jumlah Penduduk. Akibatnya, Jumlah Penduduk tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agent bertanggung jawab mengelola anggaran publik untuk memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat sebagai principal. Efektivitas belanja modal lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran pembangunan, serta efisiensi pelaksanaan program dibandingkan dengan Jumlah Penduduk semata. Daerah dengan Jumlah Penduduk besar belum tentu memperoleh manfaat yang lebih tinggi apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih kecil dapat memperoleh manfaat yang optimal apabila Belanja Modal dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliana & Asmara, (2024) dan Cherilina & Mooy, (2019) yang menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Perimbangan lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangan daerah daripada Jumlah Penduduk yang dimiliki suatu daerah.

#### **Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Belanja Modal Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut terbukti dari analisis uji nilai selisih mutlak dengan nilai sig.  $0,588 < 0,05$ . artinya Jumlah Penduduk tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan tidak selalu bergantung pada Jumlah Penduduk suatu daerah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agent bertanggung jawab mengelola anggaran publik untuk memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat sebagai principal. Efektivitas belanja modal lebih ditentukan oleh

kualitas perencanaan, ketepatan sasaran pembangunan, serta efisiensi pelaksanaan program dibandingkan dengan Jumlah Penduduk semata. Daerah dengan Jumlah Penduduk besar belum tentu memperoleh manfaat yang lebih tinggi apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih kecil dapat memperoleh manfaat yang optimal apabila Belanja Modal dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cherilina & Mooy, (2019) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian Dahliah, (2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu memberikan dampak positif terhadap Kinerja Keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan Belanja Modal lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas pembangunan dibandingkan oleh faktor demografis berupa Jumlah Penduduk.

## KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, semakin baik pula Kinerja Keuangannya. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang mengindikasikan bahwa investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset dan infrastruktur mampu mendukung peningkatan Kinerja Keuangan.

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk mampu memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, Jumlah Penduduk tidak terbukti memoderasi hubungan Dana Perimbangan maupun Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek fiskal dan demografis dalam menjelaskan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui penggunaan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi. Temuan penelitian memberikan bukti empiris bahwa faktor demografis berperan dalam memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah, tetapi tidak berperan dalam hubungan Dana Perimbangan dan Belanja Modal dengan kinerja keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya terkait peran karakteristik demografis dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel moderasi atau intervening lain, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat pendidikan, atau tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas serta metode analisis yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## REFERENSI

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan*

Akuntansi, 2(1), 1614–1624.

- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. *Internasional Journal Of Economics And Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21..9/wahana.13015>
- Arsallya, M. R., & Yusnaini, A. (2021). Research in Business & Social Science Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *Research in Business & Sosial Science*, 10(5), 95–106. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195>
- Aryllan, N., & Achmad. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan Serta Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalbar. *Prosiding Program Studi Ekonomi Islam*, 2, 260–272.
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi &Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(1), 80–96.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174.
- Cherilina, P., & Mooy, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–19.
- Dahlia, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.623>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198.
- Fadli, Rosnawintang, & Apoda. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi*, 9(2), 85–94.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. E., & Tambunan, N. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 496–502. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.993>
- Irene, M., & Siregar, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *The of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), 58–64.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1–10.
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak Abstrak Pendahuluan Perkembangan dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan. *Jurnal Of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Murib, D., Koleangan, R. A. M., & Krest D. Tolosang. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Pdrb Terhadap Pad Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 23–33.
- Nafiah, I., & Wardhani, E. D. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023. (Fadhlullah, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–17.
- Novi Natalia, & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 303–318.
- Octafiani, F., Asriati, & Arniati. (2025). Pengaruh Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan, 5(9), 240–249. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.4066>
- Oktiani, A., Studi, P., Pembangunan, E., & Baturaja, U. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16–35.
- Periansya, Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province Keywords Balancing Fund , Capital Expenditure , Locally Generated Revenue , Government Financial Performan. *Jurnal Of Accounting, Finance And Auditing Studies*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>

- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Putra, Q. J. S., Wahid, N. A., & Azhara, U. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Belanja Modal. *Jurnal Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 57–71.
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2019). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Kota-Kota Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23449.20.01.2019>
- Rika, H. (2019). Realisasi Belanja Modal Pemerintah Turun 15 Persen. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190717110641-532-412856/realisasi-belanja-modal-pemerintah-turun-15-persen>
- Riswan, & Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5(2), 71–90.
- Rustiyan, N., & Barus, I. S. L. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 250–266.
- Saldi, A. H., Zulgani, & Nurhayani. (2021). Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210.
- Setiawati, Y., Sufri, M., & Purnama, H. R. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, 4(1), 1–6.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, D., Sitanggang, D. M., Nababan, V. R., & Nasution, A. R. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 210–215. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1606>
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39–49. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1704>
- Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah, 6(2).
- Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruhpendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangandan Belanjamodal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Tridianti*, 6(1), 13–29. <https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.747>
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., & Septiani, S. (2024). Increasing Sustainable Economic Growth : Financial Performance and Capital Expenditures, 1–13. <https://doi.org/10.20944/preprints202406.0912.v1>